

PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN

Zulfadli

Dosen Tetap Fakultas Tarbiyah Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh

ABSTRAK

Manajemen pendidikan berbasis sekolah (MBS) merupakan alternatif baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreativitas sekolah. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui: 1) Pelaksanaan MBS dalam proses belajar mengajar, 2) bidang tenaga pendidik, dan 3) bidang hubungan dengan masyarakat untuk peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Lubuk Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan MBS bidang proses belajar mengajar diawali dengan mengadakan rapat untuk menyusun perencanaan pembelajaran berupa prota, prosem, silabus, KKM, dan RPP. 2) Pelaksanaan MBS dalam bidang tenaga pendidik, kepala sekolah melibatkan personil sekolah dalam merencanakan program, pelaksanaan dan evaluasi atau pertanggungjawaban kegiatan. Hal ini tampak pada peran guru dalam meningkatkan motivasi kerjanya. 3) Pelaksanaan MBS dalam bidang hubungan masyarakat dilakukan dengan beberapa upaya, yaitu pembentukan dan pemberdayaan komite sekolah, rapat rutin dengan komite sekolah tiap akhir semester, mewajibkan orang tua mengambil rapor anaknya tiap semester, menyampaikan kemunduran dan kemajuan prestasi yang dicapai sekolah, mengadakan kerja sama dengan masyarakat dalam rangka ikut berperan dalam peningkatan mutu sekolah, menyediakan informasi tentang sekolah kepada masyarakat, menumbuhkan transparansi dalam pengelolaan sekolah.

Kata Kunci: *Manajemen Berbasis Sekolah dan Mutu Pendidikan.*

A. Pendahuluan

Pendidikan mempunyai tanggung jawab besar untuk menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional dan

merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh. Tujuan pendidikan nasional yaitu “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”¹

Sekolah merupakan suatu sistem sosial yang memperoleh input sumber daya (sumber daya manusia, siswa, finansial, dan lain-lain) dari lingkungan yang selanjutnya diproses di sekolah dan akhirnya menghasilkan output yang akan dikembalikan ke lingkungan (masyarakat). Oleh karena itu, untuk menghasilkan output yang bermutu sekolah harus memiliki manajemen yang baik. Manajemen merupakan kemampuan pimpinan (manajer) dalam mendayagunakan orang lain melalui kegiatan menciptakan dan mengembangkan kerja sama dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.²

Manajemen berbasis sekolah pada intinya adalah memberikan kewenangan terhadap sekolah untuk melakukan pengelolaan dan perbaikan kualitas secara terus menerus. Desentralisasi sebagai penyerahan urusan pemerintah kepada daerah sehingga wewenang dan tanggung jawab daerah, termasuk di dalamnya penentuan kebijakan perencanaan, pelaksanaan mau yang menyangkut segi-segi pembiayaan dan aparatnya.³

Tujuan MBS adalah untuk mewujudkan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan.⁴ Dengan demikian peran pemerintah pusat akan berkurang. Sekolah diberi hak otonom untuk menentukan nasibnya sendiri. Paling tidak ada tiga tujuan dilaksanakannya MBS peningkatan efisiensi, peningkatan mutu, peningkatan pemerataan pendidikan. Dengan adanya MBS diharapkan akan memberi peluang dan kesempatan kepada kepala sekolah, guru dan siswa untuk melakukan inovasi pendidikan.

¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

² Murniati dan Nasir Usman, *Implementasi Manajemen Strategik*. (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009), hal. 37.

³ Engkoswara dan Aan Komariah. *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 292.

⁴ Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. (Bandung: Alfabeta, 2006), hal. 12.

Tanggung jawab sekolah dalam Manajemen Berbasis Sekolah bukan hanya pada proses, tetapi tanggung jawab akhirnya adalah pada hasil yang dicapai. Berdasarkan hasil observasi penulis, dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SMA Negeri 1 Lubuk Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya dana, sarana prasarana pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Hambatan yang harus dibenahi terutama manajemen pengelolaan proses belajar mengajar guru dan kualifikasi guru yang belum menunjang sehingga mempengaruhi kualitas peningkatan mutu pendidikan.

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas menunjukkan bahwa program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan suatu upaya manajemen peningkatan mutu pendidikan, maka pembahasan ini difokuskan dan dibatasi tentang “Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMA Negeri 1 Lubuk Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar”.

B. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah

Kemandirian setiap satuan pendidikan sudah menjadi satu keharusan dan merupakan salah satu sasaran dari kebijakan desentralisasi pendidikan saat ini. Sekolah-sekolah sudah seharusnya menjadi lembaga yang otonom dengan sendirinya, meskipun pergeseran menuju sekolah-sekolah yang otonom adalah jalan panjang, sehingga memerlukan berbagai kajian serta perencanaan yang hati-hati dan mendalam.

Melalui desentralisasi pendidikan memberikan kebebasan, baik kepada pemerintah daerah maupun sekolah untuk mengambil keputusan terbaik tentang penyelenggaraan pendidikan di daerah atau sekolah yang bersangkutan berdasarkan potensi daerah dan *stakeholders* sekolah. Manajemen berbasis sekolah pada intinya memberikan kewenangan terhadap sekolah untuk melakukan pengelolaan dan perbaikan kualitas secara terus menerus.⁵

Manajemen berbasis sekolah adalah keseluruhan proses merencanakan, mengorganisasikan, mengembangkan dan mengendalikan seluruh pendukung

⁵ Umiarso dan Imam Gojali. *Manajemen Mutu Sekolah*. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2010), hal. 70.

atau penggunaan (*stakeholders*) sekolah dan sumber daya sekolah untuk mencapai tujuan sekolah khususnya dan tujuan pendidikan umumnya.

Desentralisasi pendidikan di samping diakui sebagai kebijakan politik yang berkaitan dengan pendidikan, juga merupakan kebijakan yang terkait dengan banyak hal.

1. Proses Manajemen Berbasis Sekolah

Gagasan Manajemen Berbasis Sekolah perlu dipahami dengan baik oleh seluruh pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya sekolah. Karena implementasi Manajemen Berbasis Sekolah tidak sekedar membawa perubahan dalam kewenangan akademik sekolah dan tatanan pengelolaan sekolah. Akan tetapi membawa perubahan pula dalam pola kebijakan dan orientasi partisipasi orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan sekolah. Manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu alternatif pengelolaan sekolah dalam kerangka desentralisasi dalam bidang pendidikan yang memungkinkan adanya otonomi yang luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang tinggi agar sekolah lebih leluasa dalam mengelola sumber daya dan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas, kebutuhan, dan potensi setempat.⁶

Manajemen berbasis sekolah dalam pelaksanaannya sangat mengutamakan peran eksekutif sekolah. Berkaitan dengan masalah tersebut manajemen berbasis sekolah harus dapat menggerakkan sumber daya personil baik internal sekolah eksternal, sekolah atau orang-orang lain yang terkait dengan sekolah untuk dapat berperan aktif dalam upaya meningkatkan mutu sekolah. Selain itu manajemen berbasis dapat melaksanakan fungsi manajemen dalam hal pengorganisasian dan pemanfaatan sumber-sumber dalam upaya mencapai tujuan sekolah.

Dalam melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah, sekolah harus memperhatikan 10 prinsip tentang Manajemen Berbasis Sekolah, yaitu: "Keterbukaan, kebersamaan, keberlanjutan, menyeluruh, pertanggungjawaban, demokratis, kemandirian, berorientasi mutu, pencapaian pelayanan minimal, dan pendidikan untuk semua."⁷

⁶ Engkoswara dan Aan Komariah. *Administrasi Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 293.

⁷ Suparlan *et al.* *Pemberdayaan Komite Sekolah*. (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2006), hal. 18.

Model MBS menempatkan sekolah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menerapkan kebijakan, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang berdampak terhadap kinerja sekolah. Model manajemen berbasis sekolah memiliki aspek kewenangan dalam MBS meliputi:

- 1) Menyusun dan mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa;
- 2) Melakukan pengelolaan sekolah. Bentuk pengelolaan sekolah menggambarkan pelaksanaan MBS
- 3) Membuat perencanaan, melaksanakan dan pertanggung jawaban
- 4) Pelaksanaan MBS tidak lepas dari akuntabilitas yang dapat dilihat dari perencanaan sekolah dan pencapaiannya
- 5) Menjamin dan mengusahakan sumber daya manusia dan dana.
- 6) Dalam MBS dipraktekkan apa yang disebut dengan fleksibilitas sumber-sumber yang mencakup dukungan untuk (a) pelajaran dan memimpin, (b) dukungan sekolah, dan (c) lingkungan sekolah.⁸

Manajemen berbasis sekolah memberikan otonomi luas kepada sekolah, disertai seperangkat tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategi sesuai dengan kondisi setempat. Sekolah sebagai lembaga pendidikan diberi kewenangan dan kekuasaan yang luas untuk mengembangkan program-program kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik serta tuntutan masyarakat. Sekolah memiliki kekuasaan dan kewenangan mengelola dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia di masyarakat dan lingkungan sekitar.

2. Komponen Manajemen Berbasis Sekolah

Urusan-urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab sekolah dalam kerangka MBS meliputi (1) proses belajar mengajar, (2) perencanaan dan evaluasi program sekolah, (3) pengelolaan kurikulum, (4) pengelolaan ketenagaan, (5) pengelolaan peralatan dan perlengkapan, (6) pengelolaan keuangan, (7) pelayanan siswa, (8) hubungan sekolah dan masyarakat, (9) pengelolaan iklim sekolah.⁹

⁸ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi dan Implementasi*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 37.

⁹ Rohiat. *Manajemen Sekolah (Teori Dasar dan Praktik)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hal. 65.

Dalam proses belajar mengajar, cara-cara belajar siswa aktif seperti *active learning*, *cooperative learning* dan *quantum learning* perlu diterapkan. Sekolah diberikan kewenangan untuk melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhannya dan melakukan evaluasi program-program yang telah dilaksanakan.

Kurikulum sebagai rencana tertulis tentang kemampuan yang harus dimiliki berdasarkan standar nasional, materi yang perlu dipelajari dan pengalaman belajar yang harus dijalani untuk mencapai kemampuan tersebut, serta evaluasi yang perlu dilakukan untuk menentukan tingkat pencapaian kemampuan peserta didik.

Pemberdayaan sekolah dengan memberikan otonomi yang lebih besar dalam pengembangan kurikulum, di samping menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat juga dapat ditujukan sebagai sarana peningkatan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Adanya otonomi dalam pengembangan kurikulum ini merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para pengelola sekolah termasuk guru dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan. Selain itu, otonomi dalam pengembangan kurikulum memberikan keleluasaan kepada sekolah dalam mengelola sumber daya dan menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi, serta mendorong profesionalisme para pengawas, kepala sekolah, dan guru.

Manajemen personalia dalam suatu organisasi, perlu adanya suatu pengelolaan yang efektif dan efisien sehingga dapat memaksimalkan personalia dalam konteks pengembangan sumber daya manusia agar dapat memajukan organisasi sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Pengembangan sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang dari potensi yang ada pada diri seseorang dikembangkan lagi untuk dapat mengimbangi kedudukan dan perkembangan zaman.¹⁰

Dalam program pengembangan harus dituangkan sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, peserta, kurikulum dan waktu pelaksanaannya agar tujuan dari kegiatan pengembangan tersebut sesuai

¹⁰ Harun, Cut Zahri. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Yogyakarta: Pena Persada Desktop Publisher, 2010), hal. 46.

dengan yang diharapkan. Program pengembangan harus berprinsipkan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi bekerja masing-masing karyawan pada jabatannya program pengembangan suatu organisasi hendaknya diinformasikan secara terbuka kepada semua anggota (karyawan) supaya mereka mempersiapkan dirinya masing-masing.

Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Manajemen keuangan sekolah merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan, yang secara keseluruhan menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkannya secara efektif dan transparan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, manajemen keuangan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan.

Pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan.¹¹ Kegiatan yang ada dalam administrasi pembiayaan meliputi tiga hal yaitu penyusunan anggaran yang dapat disebut dengan perencanaan pembiayaan pendidikan, pembukuan yang termasuk dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan dan pengawasan pelaksanaan pembiayaan pendidikan.

Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.¹² Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, manajemen keuangan sekolah perlu dilakukan untuk menunjang penyediaan sarana prasarana dalam rangka mengefektifkan kegiatan belajar mengajar, dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik.

Hubungan sekolah dan masyarakat adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan masyarakat terutama

¹¹ Nanang Fatah, *Konsep Manajemen berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah*. (Bandung:Pustaka Bani Quraisy, 2006), hal. 23.

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.

dukungan moral dan finansial. Oleh karena itu, hampir sama halnya dengan pelayanan siswa, yang dibutuhkan adalah peningkatan intensitas dan ekstensitas hubungan sekolah dan masyarakat.

3. Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan adalah derajat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademis dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu.¹³

Mutu dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan dapat berupa hasil test kemampuan akademis (misalnya ulangan umum dan ujian Nasional). Antara proses dan hasil pendidikan yang bermutu saling berhubungan. Akan tetapi agar proses yang baik itu tidak salah arah, maka mutu dalam artian hasil (*output*) harus dirumuskan lebih dahulu oleh sekolah, dan harus jelas target yang akan dicapai untuk setiap tahun atau kurun waktu lainnya.

Pendidikan bermutu atau tidak dapat terlihat dari indikator-indikator mutu pendidikan. Indikator mutu pendidikan dapat terlihat dari dua sudut pandang yaitu "Sekolah sebagai penyedia jasa pendidikan (*service provider*) dan siswa sebagai pengguna jasa (*costumer*) yang di dalamnya ada orang tua, masyarakat dan *stakeholder*."¹⁴ Indikator mutu dari perspektif *service provider* adalah sekolah sebagai lembaga pendidikan harus memenuhi indikator produk yang bermutu dilihat dari *output* lembaga pendidikan tersebut.

C. Hasil Pembahasan

1. Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam proses belajar mengajar

Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah bidang proses belajar mengajar pada SMA negeri 1 Lubuk Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar diawali dengan perencanaan program pembelajaran. Penyusunan

¹³ Umiarso dan Imam Gojali, *Manajemen Mutu Sekolah*. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2010), hal. 125.

¹⁴ Sallis. Edward, *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan*. (Jogyakarta: IRCiSoD, 2010), hal. 24.

program pada awalnya diadopsi dari kurikulum Nasional setelah itu dalam rapat program kurikulum ini diutarakan dan setiap guru dapat memberikan masukan dan pertimbangan terhadap program yang ditawarkan, sampai pada akhirnya diambil keputusan yang dipilih untuk dijalankan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dalam perencanaan program pembelajaran disusun kegiatan dalam merumuskan visi, misi dan tujuan sekolah. Pembagian jadwal piket, Pembina upacara, Pembina MGMP sekolah, roster pelajaran dan kalender pendidikan. Bagi guru diwajibkan untuk menyusun silabus, prota, prosem, KKM dan RPP.

Penyusunan rencana pembelajaran merupakan suatu bagian terpenting dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Dikatakan penting, karena untuk guru RPP tersebut merupakan acuan atau skenario yang harus dilalui tahap demi tahap dalam memberikan materi kepada siswa. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, setiap guru wajib dan menjadi syarat mutlak untuk membuat RPP, sebelum proses penampilan di dalam kelas. Dalam penyusunan RPP ini, setiap guru harus berpedoman pada program pengajaran setiap bidang studi serta kalender akademik pada saat tahun pelajaran berlangsung.

Secara garis besar beberapa kegiatan berkenaan fungsi-fungsi manajemen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah: (a) mengelola perencanaan kurikulum; (b) mengelola implementasi kurikulum; (c) mengelola pelaksanaan evaluasi kurikulum; (d) mengelola perumusan penetapan kriteria dan pelaksanaan kenaikan kelas/kelulusan; (e) mengelola pengembangan bahan ajar, media pembelajaran, dan sumber belajar; dan (f) mengelola pengembangan ekstrakurikuler dan kokurikuler.¹⁵

Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Dalam interaksi tersebut banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal yang datang dari dalam diri pribadi individu, maupun faktor eksternal yang datang dari lingkungan. Tugas paling utama guru dalam pembelajaran adalah mengondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku dan pembentukan kompetensi peserta didik.

¹⁵ Rusman dan Toto Ruhimat, *Layanan Pengajaran Berbasis E-Learning Untuk Pemerataan Akses dan Peningkatan Mutu Pendidikan*. (Bandung: UPI, 2009), hal. 17.

2. Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam bidang tenaga pendidik untuk peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Lubuk Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar

Guru dalam penyelenggaraan MBS bidang pendidik di SMA Negeri 1 Lubuk, selalu dilibatkan dalam menentukan berbagai kebijakan sekolah, baik dalam membuat perencanaan dan pengambilan keputusan yang dianggap strategis bagi kepentingan sekolah dan masyarakat atau orang tua peserta didik. Apa yang dikemukakan oleh guru tersebut menunjukkan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah yang diterapkan di sekolahnya berimplikasi positif. Hal ini tentu saja berpengaruh positif terhadap peran guru dalam meningkatkan motivasi kerjanya. Dalam konteks itu, apa dikatakan bahwa kepala sekolah di sekolah tersebut telah memahami pentingnya perubahan paradigma penyelenggara pendidikan dari yang bersifat birokratis hierarkis menuju penyelenggaraan yang demokratis.

Selain itu, kepala sekolah juga melakukan kunjungan kelas, mengaktifkan MGMP sekolah, mengirim guru-guru untuk mengikuti pelatihan dan memberikan izin untuk melanjutkan pendidikan. Perencanaan merupakan langkah awal dalam setiap gerak langkah suatu organisasi atau dengan kata lain perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan fungsi pertama dari Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM).¹⁶

Manajemen Berbasis Sekolah yang diterapkan di sekolahnya berimplikasi positif. Hal ini tentu saja berpengaruh positif terhadap peran guru dalam meningkatkan motivasi kerjanya. Dalam konteks itu, apa dikatakan bahwa kepala sekolah di sekolah tersebut telah memahami pentingnya perubahan paradigma penyelenggara pendidikan dari yang bersifat birokratis hierarkis menuju penyelenggaraan yang demokratis. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui peningkatan SDM, partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi masyarakat, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, adanya hadiah dan sanksi sebagai hukuman dan berbagai hal lain yang dapat menumbuhkan kembangkan suasana kondusif di sekolah.¹⁷

¹⁶ Cut Zahri Harun, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Yogyakarta: Pena Persada Desktop Publisher, 2010), hal. 38.

¹⁷ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi dan Implementasi*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 13.

Kepala sekolah yang dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah, perlu ditumbuhkembangkan. Sebab maju mundurnya sekolah ditentukan oleh variabel kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah dalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah menjadi variabel determinan, kepala sekolahlah yang akan menjamin apakah Manajemen Berbasis Sekolah dapat diterapkan atau tidak.

3. Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam bidang hubungan dengan masyarakat untuk peningkatan mutu pendidikan

Pelaksanaan MBS dalam peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Lubuk Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan manajemen hubungan sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan telah dilaksanakan dalam berbagai kegiatan. Wakil kepala sekolah memberikan keterangan bahwa beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalin hubungan sekolah dengan masyarakat adalah:

- 1) Pembentukan dan pemberdayaan komite sekolah
- 2) Rapat rutin dengan komite sekolah tiap akhir semester
- 3) Mewajibkan orang tua mengambil rapor anaknya tiap semester
- 4) Mengadakan rapat dengan orang tua murid 2 kali dalam setahun
- 5) Menyampaikan kemunduran dan kemajuan prestasi yang dicapai sekolah
- 6) Mengadakan kerja sama dengan masyarakat dalam rangka ikut berperan dalam peningkatan mutu sekolah.
- 7) Menyediakan informasi tentang sekolah kepada masyarakat
- 8) Menumbuhkan transparansi dalam pengelolaan sekolah
- 9) Memperingati hari-hari besar keagamaan.

Keterangan di atas merupakan data tentang pelaksanaan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Lubuk Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Komite sekolah telah terbentuk sejak pemerintah mewajibkan sekolah untuk membentuk komite sekolah sebagai pengganti BP3.

Pembentukan komite sekolah sudah menjadi kewajiban setiap sekolah yang melaksanakan manajemen berbasis sekolah. Namun yang menjadi catatan bahwa kepala sekolah benar-benar menyadari peranan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah melakukan

peremajaan terhadap pengurus komite setiap 2 tahun sekali. Pembentukan komite sekolah bertujuan untuk:

- a) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
- b) Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan
- c) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.¹⁸

Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah selalu mengadakan rapat rutin dengan komite setiap akhir semester. Rapat ini membicarakan berbagai masalah yang dihadapi sekolah dan meminta bantuan dan dukungan dari komite sekolah untuk sama-sama mencari jalan keluarnya. Tindakan yang dilaksanakan kepala sekolah sangat tepat karena komite sekolah memang memiliki fungsi untuk menumbuhkan perhatian masyarakat terhadap program sekolah. Fungsi komite sekolah perlu disosialisasikan, diberdayakan dan direalisasikan guna mendukung program peningkatan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah

D. Penutup

Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah bidang proses belajar mengajar pada SMA Negeri 1 Lubuk Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar diawali dengan mengadakan rapat untuk menyusun perencanaan pembelajaran berupa prota, prosem, silabus, KKM, dan RPP. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar guru menjadikan RPP sebagai pedoman. Namun, dalam proses belajar mengajar, guru jarang menggunakan contoh sehari-hari pada lingkungan siswa, sehingga siswa kurang tertarik dalam mengikuti proses belajar mengajar. Setelah melaksanakan evaluasi, guru melakukan remedial bagi siswa yang belum tuntas.

Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah bidang tenaga kependidikan pada SMA Negeri 1 Lubuk Ingin Jaya Kabupaten Aceh

¹⁸ Kepmendiknas Nomor: 044/U/2002

Besar, kepala sekolah melibatkan personil sekolah dalam merencanakan program, pelaksanaan dan evaluasi atau pertanggungjawaban kegiatan. Hal ini tampak pada peran guru dalam meningkatkan motivasi kerjanya.

Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah bidang hubungan masyarakat pada SMA Negeri 1 Lubuk Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, kepala sekolah melakukan beberapa upaya yang meliputi pembentukan dan pemberdayaan komite sekolah, rapat rutin dengan komite sekolah tiap akhir semester, mewajibkan orang tua mengambil rapor anaknya tiap semester, menyampaikan kemunduran dan kemajuan prestasi yang dicapai sekolah, mengadakan kerja sama dengan masyarakat dalam rangka ikut berperan dalam peningkatan mutu sekolah, menyediakan informasi tentang sekolah kepada masyarakat, menumbuhkan transparansi dalam pengelolaan sekolah.<^>

DAFTAR PUSTAKA

- Engkoswara dan Aan Komariah. 2010. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Fatah, Nanang. 2006. *Konsep Manajemen berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah*. Bandung:Pustaka Bani Quraisy.
- Fauzan, F. (2014). Kurikulum Pendidikan Islam dalam Perspektif Tokoh Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(1), 93-105.
- Harun, Cut Zahri. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pena Persada Desktop Publisher.
- Madung, O. G. (2014). Paradigma Holisme Hegelian dan Kritik Atas Liberalisme. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(2), 45-60.
- Maimunah, M. (2014). Relevansi Metode dan Pendekatan Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(2), 287-300.
- Meriza, I. (2014). Peran Kerabat dalam Pendidikan Akhlak Anak. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(1), 106-116.
- Mulyasa, E. 2009. *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murniati dan Usman, Nasir. 2009. *Implementasi Manajemen Strategik*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.

- Nuruzzahri, N. (2014). Pengajaran Ideal dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(1), 47-60.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan menetapkan
- Rahimi, R. (2014). Metode Tabsyir dalam Pendidikan Islam dan Urgensinya dalam Pendidikan Modern. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(1), 117-130.
- Rohiat. 2010. *Manajemen Sekolah (Teori Dasar dan Praktek)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rusman dan Toto Ruhimat. 2009. *Layanan Pengajaran Berbasis E-Learning Untuk Pemerataan Akses dan Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: UPI.
- Sagala, Syaiful. 2006. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta
- Sallis, Edward. 2010. *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Suparlan *et al.* 2006. *Pemberdayaan Komite Sekolah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Syahminan, S. (2014). Modernisasi Sistem Pendidikan Islam di Indonesia pada Abad 21. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(2), 235-260.
- Tabrani ZA. (2012a). Future Life of Islamic Education in Indonesia. *International Journal of Democracy*, 18(2), 271-284.
- Tabrani ZA. (2013a). Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Satuan Pendidikan Keagamaan Islam (Tantangan Terhadap Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah). *Serambi Tarbawi*, 1(2), 65-84.
- Tabrani ZA. (2013b). Modernisasi Pengembangan Pendidikan Islam (Suatu Telaah Epistemologi Pendidikan). *Serambi Tarbawi*, 1(1), 65-84.
- Tabrani ZA. (2013b). *Pengantar Metodologi Studi Islam*. Banda Aceh: SCAD Independent.
- Tabrani ZA. (2013c). Urgensi Pendidikan Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Sintesa*, 13(1), 91-106.
- Tabrani ZA. (2014a). *Buku Ajar Filsafat Umum*. Yogyakarta: Darussalam Publishing.

- Tabrani ZA. (2014b). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Darussalam Publishing.
- Tabrani ZA. (2014c). Islamic Studies dalam Pendekatan Multidisipliner (Suatu Kajian Gradual Menuju Paradigma Global). *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(2), 211-234.
- Tabrani ZA. (2014d). Isu-Isu Kritis dalam Pendidikan Islam Perspektif Pedagogik Kritis. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 13(2), 250-270. <https://doi.org/10.22373/jiif.v13i2.75>
- Tabrani ZA. (2014e). Menelusuri Metode Pendidikan dalam Al-Qur`an dengan Pendekatan Tafsir Maudhu`i. *Serambi Tarbawi*, 2(1), 19-34.
- Umiarso dan Imam Ghofali. 2010. *Manajemen Mutu Sekolah*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.